

Penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh penyidik dittipidum Bareskrim Polri = Crime handling of trafficking in persons by dittippidum bareskrim polri investigators

Enggarani Laufria, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20477294&lokasi=lokal>

Abstrak

**ABSTRAK
**

Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif yang bersumber dari dataprimer dan sekunder melalui teknik wawancara, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan saat ini tindak pidana perdagangan orang TPPO telah berkembang menjadi suatu kejahatan kemanusiaan lintas batas negara yang terorganisasi transnational organized crime, sehingga memerlukan kerjasama darinegara-negara di dunia. Keadaan geografis, ekonomi dan sosilogis menjadikanIndonesia berpotensi sebagai negara pencarian korban maupun tujuan TPPO. Keadaan sebagian penduduk Indonesia yang berpendidikan rendah dan miskin merupakan penyebab utama penduduk nekat menjadi pekerja migran di luar daerah tinggal ataupun diluar negeri, meskipun dengan cara yang illegal. Kerentanan ini dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang dan calo. Karenanya moduskejahatan perdagangan orang dengan merekrut dan mengirim pekerja migran illegalpaling sering terjadi di Indonesia. Dittipidum Polri selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas TPPO baik melalui upaya preemptif, preventifmaupun represif. Dalam praktiknya, kendala yang dihadapi penyidik Polri antara lain adalah: 1 lokasi kejahatan yang berbeda-beda meliputi dalam dan luar negeri; 2 keterbatasan kewenangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan di luar negerisehingga mendapat tantangan dari pihak yang berwenang dan pihak pendukungkejahatan di negara terkait; 3 Keterangan calo yang berbelit-belit tentang pelakuutama, atau bahkan calo tidak kenal sama sekali; 4 korban yang tidak mau bersaksiarena takut atau berada dibawah tekanan baik sosial, ekonomi maupun psikologis. Kendala tersebut menghambat penyidik untuk mendapatkan bukti sehingga kesulitanuntuk menjerat pelaku dan pihak terkait dengan UU TPPO. Karenanya sebagianpenyidik menggunakan KUHP, UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan TKI diLuar Negeri, dan tidak dapat mengungkap dan memberantas TPPO secara komprehensif dan tuntas. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dittipidum BareskrimPolri di masa mendatang antara lain adalah dengan cara: 1 meningkatkan saranapendukung, pengetahuan, dan kapasitas penyidik dengan cara berpartisipasi pada berbagai workshop dan pelatihan; 2 terus mendorong penegak hukum melakukankoordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi di dalam negeri, dan juga terusmeningkatkan kerjasama antar negara dan dengan organisasi internasional seperti AATIP.

<hr />

**ABSTRACT
**

This thesis discusses the results of research on the analysis of Crime Handling of Trafficking in Persons by Dittipidum Bareskrim Polri Investigators This research is done by descriptive qualitative analysis method that comes from primary and secondary data through interview technique, observation and document review. The results show that the current crime of trafficking in persons TPPO has evolved into an organized transnational organized crime, thus requiring cooperation from countries in the world. Geographic, economic

and socio political conditions make Indonesia a potential as a search for victims and the destination of TPPO. The condition of some poor and poorly educated Indonesians is the main cause of the reckless population to become migrant workers outside of residence or abroad, albeit in an illegal manner. This vulnerability is used by traffickers and brokers. Hence the crime mode of trafficking in persons by recruiting and sending illegal migrant workers is most common in Indonesia. Dittipidum Polri has been doing various efforts to eradicate TPPO either through preemptive, preventive or repressive efforts. In practice, the obstacles faced by Police investigators include 1 different crime locations within and outside the country 2 the limitations of the investigator 3 authority to conduct an overseas examination so as to be challenged by the authorities and the crime supporting parties in the country concerned 3 The intricately scaled up scalper 39 s notes about the main perpetrator, or even the brokers do not know the main perpetrators at all 4 victims who do not want to testify for fear or are under social, economic and psychological pressure. These obstacles prevent the investigators from obtaining evidence so that it is difficult to trap the perpetrators and parties related under TPPO Law. Therefore, some investigators use the Criminal Code, Child Protection Law and Protection Act for Overseas Workers, and can not disclose and combat TPPO comprehensively and thoroughly. Efforts that can be undertaken by the Dittipidum Baerskrim Polri in the future are among others 1 increasing the supporting facilities, knowledge, and investigator capacity by participating in various workshops and trainings 2 continue to encourage law enforcement to coordinate and cooperate with various agencies in the country, and also to improve cooperation between countries and with international organizations such as AATIP